

**Judul** : Elite politik harus hati-hati bicara  
**Tanggal** : Senin, 07 Agustus 2017  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 6

# Elite Politik Harus Hati-hati Bicara

**JAKARTA** – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak semua elite politik menjaga suasana kondusif. Satu di antaranya harus mampu menjaga disiplin berbicara agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang membangun peradaban.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Di antaranya polemik pernyataan Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor B Laiskodat yang menyinggung empat partai pendukung intoleran dan khilafah, serta pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono yang mengaitkan PDIP dengan PKI.

“Seharusnya (berhati-hati dalam bicara) dilakukan oleh seluruh politisi. Apa pun yang dikatakan politisi mempunyai konsekuensi-konsekuensi politik dan setiap pihak harus

bertanggung jawab atas apa yang diucapkan,” kata Hasto di Jakarta kemarin.

Hasto mengungkapkan, sesuatu yang didasarkan pada hakikat sebagai sebuah bangsa harus mengedepankan budaya Timur. Hal itu penting guna membawa sebuah arah agar bisa mewujudkan cita-citanya tanpa harus menyakiti dan mencela satu sama lain.

Hal senada disampaikan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Dia mengatakan, dinamika politik yang ramai belakangan ini menjadi pembelajaran bagi elite politik agar berbicara hati-hati.

“Kalau ada apa-apa (kalau ti-

dak hati-hati bicara) dituntut, makanya pada saat yang sama kita harus berhati-hati,” kata Idrus.

Atas apa yang sudah terjadi sebagaimana dalam kasus pidato Viktor, Idrus menilai agar pihak-pihak terkait menyelesaikan dengan kekeluargaan. Dengan cara-cara kekeluargaan itu, tentu akan mampu membawa suasana yang lebih kondusif. Apalagi bulan-bulan depan akan masuk tahun politik setelah pengesahan UU Pemilu.

“Di situ masing-masing ada pengendalian diri, kami bicara untuk kepentingan rakyat,” ungkap dia.

Sebelumnya Viktor dinilai telah melakukan provokasi dalam pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam pidatonya dia sempat menyinggung konsep Khilafah dan Perppu Ormas. Dia menyebut, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan partai-partai yang mendukung konsep khilafah sehingga me-



menolak Perppu Ormas yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Atas pidato Viktor yang kemudian viral di media sosial itu, empat partai tersebut protes keras dan menuntut Viktor meminta maaf secara terbuka. Gerindra dan PAN bahkan sudah melaporkan Viktor ke Baréskrim Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik dan menebar kebencian.

Begitu juga, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan akan segera melaporkan Viktor ke Baréskrim.

"Tentu ini harus diproses secara hukum maupun etika. Kami, PKS, akan melaporkan ke Baréskrim Mabes Polri pada Senin (7/8). Kemudian secara etika, kami juga akan melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dua hal ini harus diberikan sanksi seberat-beratnya," kata Sohibul di sela-sela acara peringatan Hari Keluarga Nasional di Kantor DPD PKS Kabupaten Bogor kemarin.

Dia melanjutkan, secara pribadi pihaknya sempat menyampaikan saran kepada Surya Paloh sebagai ketua umum Partai NasDem untuk memberikan sanksi internal.

**"Apapun yang dikatakan politisi mempunyai konsekuensi-konsekuensi politik."**

**HASTO KRISTIYANTO**  
Sekjen DPP PDIP

"Saya kira sangat pantas Bang Surya Paloh memberikan sanksi internal kepada Viktor untuk dicopot dari jabatannya. Ini sebatas usulan sebagai sahabat partai politik. Tapi, kesimpulannya terserah internal Nas-

Dem," terang dia.

Hal sama disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan. Dia menilai apa yang disampaikan Viktor sangat jauh dari etika dan sarat kebencian, tentu itu juga bertentangan dengan toleransi.

"Saya dan beberapa rekan anggota dewan dari partai terkait akan mengadukannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan," kata Heri.

Di sisi lain, Anggota MKD Zainut Tauhid menjelaskan, MKD bisa memproses jika ada laporan yang masuk, kemudian laporan itu diverifikasi terlebih dahulu dari segi *legal standing*, kelengkapan administrasi, dan substansi yang diadukan. Kemudian, jika memenuhi syarat, dilakukan penyelidikan dan dilakukan sidang sesuai dengan kebutuhan.

"Kami undang pihak-pihak terkait dimulai pengadu dulu, terus pihak teradu kemudian kami juga bisa melengkapi dengan saksi-saksi dan mencari alat bukti yang ada," jelas Zainut saat dihubungi.

## Disarankan Minta Maaf

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pernyataan politikus Partai NasDem Viktor sebagai tindakan provokatif yang mengingkari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, Komnas HAM menyarankan agar Viktor segera meminta maaf kepada Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS.

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menilai, pidato Ketua Fraksi Partai NasDem di NTT beberapa waktu lalu telah menggunakan kalimat provokatif dan menuai pro-kontra dan kegaduhan sosial. Tindakan itu sama saja dengan mengingkari Indonesia sebagai bangsa multikultural.

"Sebagai wakil rakyat dan sebagai pejabat publik, dia gagal paham tentang hal paling elemental dari kewajiban konstitusionalnya sebagai pejabat publik," kata Maneger di Jakarta kemarin.

● **rahmat sahid/  
kiswondari/haryudi**